



Gaya Kepemimpinan Transformasional Susi Pudjiastuti: Revolusi Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia (2014-2019)

Transformational Leadership Style of Susi Pudjiastuti: A Governance Revolution in Indonesia's Marine and Fisheries Sector (2014–2019)

Angel Tri Anjani¹, Aqila Zakira², Rosa Afriyani³, Yulia Hanoselina⁴, Rizki Syafril⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

Email : angel30.tri04.anjani05@gmail.com¹, aqilazakira201203@gmail.com², rossafr01@gmail.com³, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁴, rizkisyafri@fis.unp.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 26-05-2025

Revised : 28-05-2025

Accepted : 30-05-2025

Published : 02-06-2025

Abstract

This study analyzes Susi Pudjiastuti's transformational leadership style during her tenure as Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia for the 2014-2019 period and its impact on the revolution in national marine and fisheries sector governance. Using a qualitative approach through a comprehensive literature study of policy documents, scientific publications, and statistical reports, this study identifies prominent characteristics of Susi Pudjiastuti's transformational leadership in the form of assertiveness in eradicating illegal fishing, authenticity in public communication, a strong maritime vision, and results orientation. The findings show that the implementation of strategic policies such as the sinking of illegal foreign vessels, a moratorium on ex-foreign vessels, digitalization of fisheries governance, and small-scale fishermen empowerment programs have resulted in significant transformations in the form of an increase in fisheries sector productivity of up to 8.64%, recovery of fish stocks from 6.5 million tons to 12.45 million tons, and an increase in the Fishermen's Exchange Rate from 103 to 114. Despite facing challenges in the form of limited human resources and technological adaptation in coastal communities, Susi Pudjiastuti's transformational leadership has succeeded in laying an important foundation for Indonesia's vision as the World Maritime Axis through an approach that integrates economic, ecological, and social aspects while still prioritizing national maritime sovereignty.

Keywords: *Susi Pudjiastuti, Transformational Leadership, Sustainable Fisheries Management*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014-2019 serta dampaknya terhadap revolusi tata kelola sektor kelautan dan perikanan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur komprehensif terhadap dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan laporan statistik, penelitian ini mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti yang menonjol berupa ketegasan dalam pemberantasan illegal fishing, autentisitas dalam komunikasi publik, visi maritim yang kuat, dan orientasi pada hasil. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan strategis seperti penenggelaman kapal asing ilegal, moratorium kapal eks asing, digitalisasi tata kelola perikanan, dan program pemberdayaan nelayan kecil telah menghasilkan transformasi signifikan berupa peningkatan produktivitas sektor perikanan hingga 8,64%, pemulihan stok ikan dari 6,5 juta ton menjadi 12,45 juta ton,



serta peningkatan Nilai Tukar Nelayan dari 103 menjadi 114. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan adaptasi teknologi di masyarakat pesisir, kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti berhasil meletakkan fondasi penting bagi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dengan tetap memprioritaskan kedaulatan maritim nasional.

Kata Kunci: Susi Pudjiastuti, Kepemimpinan Transformasional, Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah lama menghadapi beragam tantangan struktural yang menghambat optimalisasi potensinya. Problematika ini mencakup kerangka regulasi yang tidak koheren, tumpang tindih kewenangan antar institusi pemerintah, serta mekanisme perizinan yang rumit dan birokratis. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat implementasi kebijakan yang efektif, tetapi juga membatasi potensi ekonomi masyarakat pesisir dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Permasalahan ini semakin diperburuk dengan meningkatnya pencemaran perairan akibat aktivitas industrial yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati laut dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan komunitas nelayan. Sejak tahun 1957, pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya mengembangkan kebijakan kelautan nasional dengan pendekatan multisektoral, namun inkonsistensi regulasi dan konflik kewenangan tetap menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada Oktober 2014, dinamika pengelolaan kelautan Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan dilantikannya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Meskipun awalnya diragukan karena latar belakangnya sebagai pengusaha, Susi membuktikan dedikasinya dengan mengundurkan diri dari berbagai posisi strategis di perusahaannya, termasuk Susi Air dan PT. ASI Pudjiastuti, untuk menghindari konflik kepentingan dan fokus sepenuhnya pada tugas kenegaraan. Kepemimpinannya ditandai dengan ketegasan dan keberanian yang luar biasa dalam memberantas praktik ilegal di perairan Indonesia, dengan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan menjadi langkah ikonik yang mengundang perhatian publik domestik maupun internasional. Selama masa jabatannya hingga Oktober 2019, Susi berhasil menenggelamkan 556 kapal ilegal dan secara signifikan meningkatkan stok perikanan nasional, pencapaian yang mengantarkannya meraih tingkat kepuasan publik mencapai 91,95% dan menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terbaik dalam kabinet.

Artikel ini menganalisis pendekatan kepemimpinan transformasional yang diterapkan Susi Pudjiastuti dalam merevolusi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Kepemimpinan transformasionalnya tercermin dalam kemampuannya menginspirasi, memotivasi, dan mendorong inovasi melalui berbagai kebijakan progresif selama masa jabatannya. Sebagaimana diungkapkan dalam kajian akademis tentang gaya kepemimpinannya di era modern, Susi mendemonstrasikan pendekatan yang berani, inovatif, dan inklusif dalam mengelola sumber daya kelautan, sekaligus memperjuangkan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Dampak positif dari



kepemimpinannya terlihat nyata dalam peningkatan kesejahteraan nelayan, penurunan drastis praktik penangkapan ikan ilegal, pemulihan stok ikan nasional, serta inisiatif inovatif seperti kolaborasi dengan Global Fishing Watch untuk sistem pengawasan perairan berbasis teknologi modern yang menjadi model pengelolaan perikanan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan pendekatan kajian kepustakaan yang sistematis, berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan awal melibatkan identifikasi dan seleksi sumber pustaka yang kredibel serta dokumen ilmiah yang sesuai dengan kriteria penelitian. Selanjutnya, analisis mendalam dilakukan terhadap literatur terpilih guna memperoleh pemahaman komprehensif terkait permasalahan yang dikaji. Sumber data yang digunakan meliputi buku referensi, jurnal akademik bereputasi, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan publikasi kredibel lain yang berkaitan dengan topik. Pada tahap akhir, dilakukan sintesis kritis terhadap seluruh informasi yang telah dianalisis untuk menghasilkan wawasan baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti dilahirkan pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat dari pasangan H. Ahmad Karlan dan Hj. Suwuh Lasminah yang berasal dari keluarga pedagang ternak. Perjalanan pendidikannya tidak konvensional, dimulai dari SMP Negeri 1 Pangandaran dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun, karena permasalahan kesehatan dan ketidakcocokan dengan sistem pendidikan formal, Susi memutuskan untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengahnya dan berhenti di kelas dua SMA. Keaktifannya dalam komunitas Gerakan Golput juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ia dikeluarkan dari sekolah.

Meski tidak menyelesaikan pendidikan formal dan tidak memiliki gelar sarjana, Susi memiliki kecerdasan alamiah dan semangat belajar yang tinggi. Ia dikenal karena kegemarannya membaca dan mempelajari bahasa asing secara otodidak, sehingga mampu menguasai bahasa Inggris dan Jerman dengan fasih. Kemampuan berbahasa ini kemudian menjadi salah satu keterampilan yang membedakannya dari menteri-menteri lain ketika ia bergabung dengan kabinet pemerintah. Bagi Susi, keterbatasan pendidikan formal bukan menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan, melainkan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui pengalaman praktis dan pendidikan informal.

Jiwa wirausaha Susi Pudjiastuti sudah terlihat sejak usia muda. Ketika masih duduk di bangku SMP, ia sudah aktif berjualan berbagai komoditas termasuk ikan keliling, bed cover, dan pakaian. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan formalnya, pada tahun 1983 Susi memulai kariernya sebagai pengepul ikan di Pangandaran dengan modal awal yang sangat



terbatas, hanya Rp750.000 yang diperoleh dari penjualan perhiasannya. Berkat kerja keras, keberanian, dan kemampuan inovasinya, usaha kecil ini berkembang pesat.

PT ASI Pudjiastuti Marine Product didirikan oleh Susi pada tahun 1996 sebagai perusahaan yang berkonsentrasi pada pengolahan dan ekspor produk perikanan dengan mengandalkan lobster sebagai komoditas utama yang dipasarkan dengan brand "Susi Brand". Kesuksesan perusahaan ini terbukti melalui kemampuannya dalam menembus pasar lokal maupun mancanegara, yang mencerminkan keahlian Susi dalam membangun dan memperluas jaringan bisnis secara efektif. Tantangan untuk mendistribusikan produk perikanan segar dengan waktu yang singkat ke berbagai destinasi pasar, khususnya Jakarta dan Jepang, menjadi faktor pendorong utama. Kondisi tersebut mendorong Susi untuk melakukan investasi dalam skala besar pada sektor transportasi penerbangan guna mendukung kelancaran distribusi produknya.

Pada tahun 2004, Susi mengambil keputusan berani dengan membeli pesawat Cessna Caravan senilai Rp20 miliar untuk mendukung bisnis perikanannya. Investasi ini menjadi cikal bakal maskapai penerbangan Susi Air. Sebuah peristiwa tak terduga mengubah arah bisnisnya ketika bencana tsunami Aceh terjadi pada tahun yang sama. Pesawat milik Susi menjadi transportasi pertama yang mendarat di Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sejak saat itu, karena bisnis perikanannya mengalami penurunan, Susi mengalihkan fokusnya ke bisnis penerbangan dengan menyewakan pesawatnya.

Ekspansi bisnis penerbangan Susi mengalami perkembangan yang signifikan, yang ditandai dengan pendirian PT ASI Pudjiastuti Flying School pada tahun 2008 sebagai lembaga pelatihan pilot profesional. Pertumbuhan perusahaan ini berlanjut secara konsisten hingga mencapai puncaknya di awal tahun 2012, ketika Susi Air berhasil mengoperasikan armada yang terdiri dari sekitar 50 pesawat dengan berbagai jenis aircraft. Komposisi armada tersebut meliputi 32 unit Cessna Grand Caravan, 9 unit Pilatus Porter, 1 unit Diamond Star, dan 1 unit Diamond Twin Star yang mendukung operasional maskapai. Keberhasilan diversifikasi bisnis Susi dari sektor perikanan menuju industri penerbangan terbukti melalui kemampuan perusahaan dalam mempekerjakan lebih dari 130 pilot yang menunjukkan skala operasional yang besar.

Karier Susi Pudjiastuti mencapai tonggak sejarah baru pada tanggal 26 Oktober 2014 ketika secara resmi dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai bentuk komitmen profesional terhadap amanah yang diberikan kepadanya, Susi mengambil keputusan untuk melepaskan seluruh posisi strategis dalam bisnis yang ia bangun sebelumnya. Langkah tersebut meliputi pengunduran diri dari jabatan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti serta berbagai posisi kunci lainnya di Susi Air yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan bisnisnya. Tindakan ini mencerminkan dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik, sekaligus memastikan tidak terjadi benturan kepentingan antara tanggung jawab negara dengan aktivitas bisnis personal.



Sepanjang periode kepemimpinannya dari tahun 2014 hingga 2019, Susi Pudjiastuti membangun reputasi sebagai figur yang eksentrik namun tegas dalam mengambil berbagai keputusan strategis yang tidak mengikuti pola konvensional. Prestasi historis dicatatkan oleh Susi sebagai perempuan pionir yang menjabat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, sekaligus menunjukkan bukti konkret bahwa pencapaian kesuksesan tidak selamanya membutuhkan latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Penunjukan Susi sebagai menteri pada awalnya memicu perdebatan publik karena penampilan dan gaya hidupnya yang dianggap tidak lazim untuk seorang pejabat negara, termasuk kebiasaan merokoknya dan tato burung Phoenix yang menghiasi kakinya sebagai simbol api yang tak pernah padam. Namun demikian, Susi berhasil membungkam kritik tersebut dengan menunjukkan profesionalisme dan kompetensi yang terbukti melalui berbagai pencapaian kinerja yang nyata selama masa jabatannya.

Era kepemimpinan Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarakterisasi oleh implementasi berbagai kebijakan inovatif yang diarahkan untuk mengembangkan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, melakukan konservasi terhadap sumber daya maritim, dan melakukan pemberantasan terhadap aktivitas ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Salah satu kebijakan yang paling mencuri perhatian publik adalah penerapan langkah tegas berupa penenggelaman kapal-kapal milik negara asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Meskipun kebijakan ini tergolong kontroversial, namun efektivitasnya dalam memberikan efek jera terbukti signifikan dan berhasil meraih dukungan yang luas dari masyarakat Indonesia. Di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut juga tidak luput dari berbagai kritik dan penolakan yang datang dari berbagai kalangan baik domestik maupun internasional.

Prestasi gemilang Susi Pudjiastuti dalam melaksanakan amanah kepemimpinannya mendapat pengakuan resmi melalui serangkaian penghargaan bergengsi yang diberikan oleh berbagai institusi nasional maupun internasional, termasuk apresiasi dari WWF dan pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro. Eksistensi keberhasilan masa jabatannya sebagai menteri juga tergambar dari indeks kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap performance dan kontribusinya dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Masa tugas Susi sebagai menteri berakhir pada bulan Oktober 2019 ketika posisinya diserahkan kepada Edhy Prabowo sebagai penggantinya dalam kabinet selanjutnya. Pasca mengakhiri karier politiknya, Susi memilih untuk kembali menekuni dunia kewirausahaan di sektor perikanan dengan melanjutkan dan mengembangkan kembali usaha bisnis yang telah menjadi fondasi awal perjalanan kariernya.

Model kepemimpinan yang dijalankan oleh Susi Pudjiastuti membuktikan bahwa keaslian karakter dan integritas pribadi memiliki nilai yang lebih signifikan dibandingkan dengan kualifikasi akademik formal dalam menjalankan transformasi organisasi yang efektif. Walaupun latar belakang pendidikannya hanya sampai tingkat SMP, konsistensi Susi dalam mempertahankan identitas personalnya seperti gaya berkomunikasi yang terus terang, rutinitas merokok, dan penampilan yang tidak mengikuti standar konvensional, malah menjadi modal kekuatan yang berhasil membangun trust dari masyarakat. Fenomena ini memberikan pembelajaran penting



bahwa sosok pemimpin transformasional yang sukses adalah individu yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan kepribadian asli mereka tanpa berusaha menyamarkan background maupun ciri khas individual yang dimilikinya. Keaslian karakter tersebut mampu menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan para pengikutnya dan membangun otoritas kepemimpinan yang tidak tergantung pada atribut-atribut formal dari kekuasaan.

Karakteristik Kepemimpinan Transformasional Susi Pudjiastuti

Salah satu karakteristik kepemimpinan transformasional yang paling menonjol dari Susi Pudjiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 adalah ketegasan dan keberaniannya dalam memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal yang diterapkannya menjadi bukti nyata dari pendekatan kepemimpinan yang tegas dan berani mengambil risiko. Selama masa kepemimpinannya, Susi Pudjiastuti berhasil memimpin penenggelaman lebih dari 300 kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia, suatu tindakan yang mendapat perhatian internasional dan dianggap sebagai langkah berani dalam memerangi illegal fishing. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan ketegasan Susi dalam melindungi sumber daya laut Indonesia, tetapi juga mencerminkan keberaniannya dalam menegakkan kedaulatan negara di wilayah perairan nasional.

Ketegasan dan keberanian Susi Pudjiastuti dalam memberantas pencurian ikan telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor perikanan Indonesia. Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal *Nature Ecology & Evolution*, kebijakan penenggelaman kapal ilegal berhasil mengurangi aktivitas penangkapan ikan ilegal secara drastis, yang berdampak pada peningkatan stok ikan di perairan Indonesia. Studi tersebut menyatakan bahwa kebijakan anti-illegal fishing yang agresif telah mengurangi total upaya penangkapan ikan setidaknya sebesar 25%, yang berpotensi menghasilkan peningkatan tangkapan sebesar 14% dan peningkatan keuntungan sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti yang tegas dan berani telah memberikan dampak positif bagi pelestarian sumber daya laut Indonesia dan peningkatan ekonomi sektor perikanan.

Karakter kepemimpinan transformasional yang dimiliki Susi Pudjiastuti tercermin melalui keaslian diri dan pendekatan komunikasi yang bersifat terus terang serta tidak dibuat-buat. Walaupun hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Susi Pudjiastuti berhasil menarik perhatian besar dari media massa dan masyarakat umum melalui karakter kepribadian yang kokoh, determinasi yang luar biasa, dan upaya maksimal dalam mewujudkan cita-citanya. Kisah perjalanan hidup yang penuh dengan nilai-nilai inspiratif ini merupakan cerminan dari keaslian seorang figur pemimpin yang memiliki keberanian untuk menampilkan identitas asli dirinya tanpa topeng atau penyamaran. Autentisitas yang ditunjukkan oleh Susi ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan sejati tidak memerlukan pencitraan artifisial, melainkan keberanian untuk tetap konsisten dengan karakter dan nilai-nilai personal yang diyakini.

Pendekatan komunikasi Susi Pudjiastuti yang bersifat terus terang dan transparan telah menjadi modal utama dalam membangun relasi yang solid dengan berbagai stakeholder, khususnya



para nelayan kecil yang menjadi sasaran utama program-programnya. Karakter personalnya yang terbuka dan bersahabat, disertai dengan tingkat kesadaran yang tinggi dalam memikul tanggung jawab, kedisiplinan diri yang konsisten, serta kemampuan kontrol diri yang baik, menjadikan Susi sebagai individu yang memiliki kapasitas komunikasi interpersonal yang efektif. Dalam praktik berkomunikasi sehari-hari, Susi Pudjiastuti dikenal sebagai figur yang mampu menjalin komunikasi secara transparan dan memiliki kesediaan untuk merespons dengan antusiasme terhadap berbagai informasi yang diterimanya. Keberanian Susi dalam mengekspresikan pandangan dan pemikirannya di hadapan publik tanpa rasa takut atau ragu-ragu semakin memperkuat posisinya sebagai komunikator yang kredibel dan autentik.

Kemampuan Susi Pudjiastuti untuk berempati dengan orang lain, terutama nelayan kecil, juga merupakan bagian dari gaya komunikasinya yang autentik. Ia mampu merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat pesisir, sehingga percakapan yang dilakukan dengan mereka tersampaikan dengan baik. Sikap mendukung satu sama lain dengan saling berinteraksi dan bertukar informasi menjadikan Susi Pudjiastuti sebagai seorang komunikator yang dapat mendukung masyarakat dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Hal ini mencerminkan karakteristik kepemimpinan transformasional yang mementingkan pembangunan hubungan dan komunikasi yang efektif dengan para pengikutnya.

Kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti tercermin melalui visinya yang kuat dalam sektor maritim untuk mendukung konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia berperan strategis dalam merealisasikan visi Presiden Joko Widodo yang bertujuan menempatkan Indonesia sebagai pusat kekuatan maritim di tingkat global. Visi ambisius ini dilandasi oleh keunggulan posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah yang menjadi modal utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam upaya merealisasikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Susi Pudjiastuti memusatkan perhatiannya pada penguatan kedaulatan laut Indonesia. Penerapan kebijakan tegas yang dilakukannya untuk memberantas illegal fishing, termasuk aksi penenggelaman kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal, merupakan bagian integral dari strategi Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui penegakan hukum yang konsisten di perairan nasional. Melalui penerapan pendekatan yang tegas dan berani, Susi Pudjiastuti berhasil memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di wilayah laut serta melindungi aset sumber daya perikanan nasional. Langkah strategis ini menjadi fondasi penting dalam proses mewujudkan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Visi maritim Susi Pudjiastuti juga tercermin dalam upayanya untuk memperkuat kelembagaan maritim Indonesia. Ia menyadari bahwa untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia, diperlukan penguatan kelembagaan maritim yang efektif. Susi Pudjiastuti bekerja keras untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut Indonesia, meskipun menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga maritim. Hal



ini menunjukkan kemampuannya dalam memimpin perubahan organisasi, yang merupakan salah satu ciri kepemimpinan transformasional.

Ciri khas kepemimpinan transformasional yang dimiliki Susi Pudjiastuti tercermin dari fokusnya yang berorientasi pada pencapaian hasil, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan. Sepanjang masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dikenal luas karena penerapan pendekatan kebijakan yang selalu mengutamakan hasil nyata. Orientasi pada hasil ini termanifestasi dengan jelas melalui berbagai kebijakan strategis yang berhasil diimplementasikannya. Pendekatan ini menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mencapai target-target konkret untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Penerapan kebijakan tegas dalam memberantas penangkapan ikan ilegal memiliki tujuan ganda, yaitu tidak hanya untuk menegakkan kedaulatan perairan Indonesia tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Berdasarkan publikasi dalam *KALA MANCA: Jurnal Pendidikan Sejarah* dengan judul "Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti", kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan aktivitas perburuan ilegal telah menghasilkan peningkatan jumlah tangkapan ikan bagi nelayan lokal. Dampak positif ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pencapaian tersebut sejalan dengan salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Susi Pudjiastuti yang fokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan.

Di samping itu, Susi Pudjiastuti juga memusatkan perhatian pada pengembangan inovasi teknologi dan membangun kolaborasi internasional sebagai strategi untuk mencapai target hasil yang diharapkan. Melalui kerjasama dengan Global Fishing Watch (GFW), ia mengawasi implementasi teknologi digital dalam sistem pemantauan aktivitas perikanan yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan inovatif tersebut menghasilkan pencapaian yang signifikan bagi sektor perikanan Indonesia dengan pertumbuhan mencapai 8,96%. Kesuksesan ini juga turut berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara keseluruhan.

Orientasi Susi Pudjiastuti pada pencapaian hasil nyata juga termanifestasi dalam upayanya untuk memperkuat perlindungan sosial bagi para nelayan. Ia secara aktif memperjuangkan hak-hak nelayan melalui implementasi norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup program kepemilikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) khusus untuk nelayan. Implementasi kebijakan ini berhasil meraih pengakuan di tingkat internasional. Dampak positif dari kebijakan tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan taraf kesejahteraan nelayan Indonesia.

Dampak ekonomi positif dari kebijakan-kebijakan Susi Pudjiastuti sangat signifikan. Stok ikan di perairan Indonesia meningkat dari 6,5 juta ton pada 2013 menjadi 12,45 juta ton pada 2017. Peningkatan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan nelayan, yang tercermin dari naiknya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 menjadi 114 dan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)



menjadi 127. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti yang berorientasi pada hasil telah berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan Indonesia.

Ciri kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti termanifestasi melalui kapasitasnya dalam memberikan inspirasi dan motivasi kepada berbagai pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Meskipun latar belakang pendidikan formalnya hanya mencapai tingkat Sekolah Menengah Pertama, Susi berhasil membuktikan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu tergantung pada pencapaian gelar akademis formal, tetapi lebih pada kecerdasan alami, semangat pembelajaran yang tinggi, serta kemampuan untuk mentransformasi visi menjadi aksi konkret. Perjalanan hidupnya dari seorang pedagang kecil menjadi pengusaha sukses dan akhirnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menciptakan cerita inspiratif yang memotivasi banyak pihak, khususnya nelayan kecil dan komunitas pesisir. Keaslian dalam berkomunikasi yang ditunjukkan melalui gaya bicara yang terus terang, terbuka, dan natural memungkinkan Susi membangun hubungan emosional yang mendalam dengan para pengikutnya, sehingga tercipta rasa kepercayaan dan kesetiaan di antara mereka.

Kemampuan berempati dengan perjuangan nelayan kecil, yang bersumber dari pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi, memungkinkan Susi untuk merumuskan kebijakan yang secara tepat menjawab kebutuhan nyata mereka. Penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik penangkapan ikan ilegal bukan hanya menunjukkan keberaniannya dalam mengambil risiko, tetapi juga mencerminkan dedikasi terhadap transformasi sistemik dalam pengelolaan sektor kelautan. Fokusnya pada pencapaian hasil, yang terbukti dari peningkatan stok ikan, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan, membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional yang efektif bukan hanya tentang menginspirasi, tetapi juga tentang menghasilkan dampak nyata yang dapat diukur. Hal ini memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana kepemimpinan yang autentik, berani, dan berorientasi hasil dapat menjadi pendorong perubahan positif dalam sistem tata kelola yang kompleks, bahkan ketika menghadapi tantangan dan resistensi dari berbagai kalangan.

Pendekatan kepemimpinan Susi Pudjiastuti mendemonstrasikan bahwa transformasi sejati memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan kontroversial yang mungkin menimbulkan resistensi namun strategis untuk jangka panjang. Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal yang menuai kritik internasional menunjukkan bahwa pemimpin transformasional harus siap menghadapi tekanan dari berbagai pihak demi menegakkan prinsip yang diyakini benar. Keberanian ini bukan sekedar tindakan impulsif, melainkan keputusan yang diperhitungkan berdasarkan visi jangka panjang tentang kedaulatan maritim Indonesia. Hal ini mengajarkan bahwa pemimpin transformasional yang efektif adalah mereka yang tidak takut menjadi kontroversial ketika situasi menuntut tindakan tegas untuk menciptakan perubahan sistemik.



Revolusi Kebijakan dan Program Strategis beserta Dampak Kepemimpinan Susi Pudjiastuti

Perubahan mendasar dalam kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia telah menghasilkan dampak yang signifikan pada berbagai dimensi, mulai dari produktivitas perikanan hingga restorasi ekosistem laut. Revolusi dalam kebijakan yang dimulai pada tahun 2014 dengan penerapan pendekatan tegas dan inovatif telah menciptakan pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya maritim nasional. Transformasi ini menandai era baru dalam tata kelola sektor kelautan Indonesia. Pendekatan yang komprehensif dan progresif ini menjadi fondasi bagi perubahan sistemik yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui pembentukan Satuan Tugas 115 berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 telah mencapai hasil yang sangat signifikan. Kebijakan ini diperkuat dengan strategi penenggelaman kapal asing ilegal yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Penerapan kebijakan yang tegas ini telah berhasil mengurangi aktivitas penangkapan ikan ilegal sebesar 25%, yang berkorelasi langsung dengan potensi peningkatan hasil tangkapan sebesar 14% dan peningkatan keuntungan sebesar 12% sebagaimana dilaporkan dalam studi yang dipublikasikan di *Nature Ecology & Evolution*. Capaian ini menunjukkan efektivitas pendekatan yang tegas dalam menangani permasalahan penangkapan ikan ilegal.

Dampak positif dari kebijakan moratorium untuk kapal eks asing yang diberlakukan sejak 14 November 2014 tercermin dalam data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam periode Januari-April 2015, sektor perikanan Indonesia mengalami peningkatan produksi yang mencapai 50,32 juta ton, jauh melampaui capaian periode yang sama pada tahun 2013 dan 2014. Peningkatan produktivitas ini terjadi di saat ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, dengan sektor perikanan mencatatkan pertumbuhan dari 7,46% pada periode 2014 menjadi 8,64% di tahun berikutnya. Pencapaian ini menunjukkan resiliensi sektor perikanan di tengah tantangan ekonomi makro.

Kebijakan pemberantasan IUU Fishing tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada stabilisasi harga ikan di pasar domestik. BPS mencatat adanya penurunan harga ikan bandeng dan ikan kembung, dua komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, menjadikan protein berkualitas ini lebih terjangkau bagi konsumen. Secara ekonomi makro, sektor perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan nasional dengan membukukan pendapatan sekitar USD39,35 juta (sekitar Rp11 triliun) dalam empat bulan pertama setelah implementasi kebijakan tersebut. Kontribusi ini menyumbang surplus perdagangan sebesar USD0,4 miliar dari total surplus nasional USD2,77 miliar.

Transformasi digital dalam tata kelola perikanan merupakan dimensi penting dari revolusi kebijakan yang diimplementasikan. Penggunaan sistem pemantauan kapal secara digital, termasuk kolaborasi dengan platform Fishing Watch Global dan Google, telah meningkatkan efektivitas pengawasan aktivitas di perairan Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pergerakan kapal, memperkuat upaya deteksi dan pencegahan aktivitas ilegal di wilayah



perairan nasional. Integrasi teknologi digital ini menjadi terobosan dalam modernisasi sistem pengawasan maritim.

Digitalisasi juga merambah aspek perizinan dan transshipment ikan, menciptakan transparansi dalam proses yang sebelumnya rentan terhadap penyimpangan. Dengan penerapan teknologi digital berbasis Android, proses transshipment dapat direkam dan dipantau secara akurat, mencakup data waktu serah terima, lokasi, dan volume tangkapan. Peningkatan transparansi ini telah berkontribusi pada penguatan integritas industri perikanan nasional dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Sistem digital ini menjadi fondasi bagi tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Penguatan kedaulatan maritim melalui pengawasan digital didukung oleh peran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Lembaga ini memanfaatkan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan berkolaborasi dengan berbagai institusi untuk memantau dan menindak pelanggaran di laut. Menurut penelitian dari Universitas Indonesia, penggunaan teknologi pengawasan laut dapat meningkatkan produktivitas perikanan hingga 30%, menunjukkan korelasi positif antara investasi teknologi dan hasil tangkapan nelayan. Temuan ini menegaskan pentingnya investasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Program pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil merepresentasikan dimensi sosial dari revolusi kebijakan maritim. Upaya pemberdayaan ini mencakup peningkatan keterampilan melalui pelatihan teknis, penyediaan sarana produksi modern, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar. Pendekatan komprehensif ini bertujuan menjadikan pelaku usaha perikanan skala kecil lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Program ini menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di sektor perikanan.

Gaya kepemimpinan progresif dan inovatif yang diterapkan Susi Pudjiastuti telah menjadi katalisator dalam transformasi tata kelola sektor kelautan Indonesia. Sebagaimana dianalisis oleh Anjeli et al. (2024) dalam *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, pendekatan Pudjiastuti menonjol dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan, meskipun berhadapan dengan struktur politik yang didominasi laki-laki. Kebijakan penenggelaman kapal ilegal dan moratorium kapal asing merefleksikan transformasi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa perubahan substantif dapat dicapai melalui pendekatan yang berani dan konsisten.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan transformatif ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Rahmanda (2024) dalam *Jurnal Transformasi Administrasi* menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi aparatur sebagai kendala utama dalam implementasi inovasi. Tantangan ini mencakup kurangnya pelaporan data dan keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan program inovatif di tingkat daerah. Sementara itu, aspek digitalisasi juga menghadapi hambatan adaptasi teknologi, terutama di kalangan masyarakat pesisir yang



belum sepenuhnya siap dengan transformasi digital sebagaimana dibahas Pratiwi (2021) dalam Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.

Dimensi ekologis dari revolusi kebijakan maritim tercermin dalam inisiatif konservasi laut dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Kepulauan Seribu menjadi contoh implementasi Wisata Bahari Berbasis Konservasi yang mengandalkan sumber daya bahari sebagai daya tarik wisata dengan pendekatan ramah lingkungan. Program konservasi penyu di kawasan ini memungkinkan partisipasi wisatawan dalam upaya pelestarian, memperkuat hubungan antara sektor pariwisata dan konservasi lingkungan. Integrasi antara pariwisata dan konservasi ini menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang inovatif.

Diversifikasi ekonomi maritim melalui pengembangan wisata bahari memberikan kontribusi pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Konsep laut sebagai inti dari kehidupan masyarakat pesisir, yang berakar pada tradisi maritim Nusantara, menjadi landasan dalam melihat laut bukan sekadar batas geografis tetapi sebagai ruang ekonomi yang strategis. Peningkatan kedaulatan pangan dan energi membutuhkan sistem transportasi laut yang efisien dan terkendali, dengan kapal sebagai elemen kunci dalam rantai pasokan nasional. Paradigma baru ini menempatkan laut sebagai aset strategis untuk pembangunan ekonomi nasional.

Penguasaan kapal dalam konteks kedaulatan ekonomi memberikan Indonesia daya tawar yang kuat dalam memastikan pasokan bahan kebutuhan pokok. Tanpa memperhatikan kedaulatan maritim, upaya mencapai kedaulatan ekonomi akan kehilangan landasan pentingnya. Kebijakan pemberantasan IUU Fishing, dengan demikian, tidak hanya terkait dengan sektor perikanan tetapi juga memperkuat fondasi kedaulatan maritim secara keseluruhan. Keterkaitan antara kedaulatan maritim dan ekonomi ini menjadi kunci dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang.

Revolusi kebijakan maritim Indonesia telah menghasilkan dampak multidimensi pada produktivitas perikanan, pemulihan ekosistem laut, dan penguatan kedaulatan maritim nasional. Kebijakan pemberantasan IUU Fishing, moratorium kapal asing, digitalisasi perikanan, dan program pemberdayaan nelayan merepresentasikan pendekatan komprehensif dalam transformasi sektor kelautan. Meski menghadapi berbagai tantangan implementasi, capaian yang dihasilkan menunjukkan esensi laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran bangsa, memperkuat narasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Transformasi ini membuktikan bahwa pendekatan holistik dan konsisten dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Revolusi kebijakan dan program strategis yang diimplementasikan oleh Susi Pudjiastuti memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya integrasi pendekatan multidimensional dalam transformasi tata kelola sektor publik yang kompleks. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah bagaimana kebijakan yang tegas, berani, dan terkadang kontroversial, seperti penenggelaman kapal asing ilegal, dapat menjadi katalisator perubahan sistemik ketika didukung oleh data ilmiah yang kuat serta visi jangka panjang yang jelas. Kebijakan pemberantasan IUU Fishing mengajarkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta menciptakan efek jera yang



efektif bagi pelanggar. Transformasi digital dalam tata kelola perikanan melalui sistem pemantauan kapal dan digitalisasi perizinan menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi pengungkit untuk meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan membangun sistem yang lebih akuntabel.

Program pemberdayaan nelayan kecil menggarisbawahi pentingnya dimensi keadilan sosial dalam kebijakan publik, di mana pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan manfaat bagi kelompok rentan. Sementara itu, pendekatan konservasi laut dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan menekankan prinsip bahwa eksploitasi sumber daya alam harus berjalan seiring dengan upaya pelestariannya. Tantangan implementasi yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan adaptasi teknologi, memberikan pelajaran tentang pentingnya pengembangan kapasitas dan perubahan mindset dalam mendukung inovasi kebijakan. Yang mungkin paling signifikan, keberhasilan revolusi kebijakan maritim di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti mendemonstrasikan bagaimana visi strategis yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat, berani, dan autentik dapat mengatasi hambatan birokrasi dan resistensi politik untuk menghasilkan perubahan yang substansial dalam waktu relatif singkat, menciptakan model tata kelola yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional saat ini tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya untuk masa depan.

Gaya kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti menunjukkan bahwa inspirasi sejati datang dari kemampuan menerjemahkan visi menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Bukan hanya retorika atau janji-janji politik, tetapi pencapaian konkret seperti peningkatan kesejahteraan nelayan dan pemulihan ekosistem laut yang menjadi sumber inspirasi bagi pengikutnya. Pendekatan ini mengajarkan bahwa kepemimpinan transformasional yang berkelanjutan harus mampu membuktikan bahwa perubahan yang diusung bukan hanya konsep abstrak, melainkan realitas yang memberikan manfaat tangible. Kemampuan untuk menghasilkan dampak terukur sambil tetap mempertahankan visi jangka panjang menjadi karakteristik penting yang membedakan pemimpin transformasional sejati dari sekedar pemimpin yang karismatik namun tidak produktif.

KESIMPULAN

Studi mengenai gaya kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinannya yang otentik, tegas, dan berorientasi pada hasil telah menciptakan transformasi yang signifikan dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia selama periode 2014-2019. Karakteristik kepemimpinan transformasional yang paling menonjol adalah keberaniannya dalam mengambil kebijakan kontroversial namun terbukti efektif, terutama kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal, yang berhasil mengurangi aktivitas penangkapan ikan ilegal hingga 25%. Kebijakan ini secara langsung meningkatkan hasil tangkapan sekitar 14% dan keuntungan sebesar 12%, menciptakan dampak ekonomi yang substansial bagi sektor perikanan nasional. Meskipun hanya memiliki latar belakang pendidikan formal hingga SMP, Susi Pudjiastuti membuktikan bahwa keefektifan kepemimpinan tidak selalu bergantung pada gelar akademis,



melainkan pada kecerdasan alamiah, semangat belajar tinggi, dan kemampuan menerjemahkan visi menjadi tindakan nyata.

Kemampuannya dalam membangun komunikasi terbuka dan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama nelayan kecil, menjadi faktor krusial dalam memperoleh dukungan publik yang luas terhadap kebijakan-kebijakannya yang terkadang tidak konvensional. Narasi inspiratif tentang perjalanan kariernya dari pedagang kecil hingga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan berhasil menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan para pengikutnya. Hal ini menumbuhkan rasa kepercayaan dan loyalitas yang menjadi modal sosial penting dalam implementasi kebijakan transformatif. Keterampilan komunikasi yang efektif ini menjadi kunci dalam memobilisasi dukungan untuk agenda perubahan yang ambisius.

Revolusi kebijakan maritim yang diimplementasikan selama masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti telah menciptakan dampak multidimensi pada berbagai aspek pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Kebijakan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui pembentukan Satuan Tugas 115 berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015, moratorium kapal eks asing yang diberlakukan sejak 14 November 2014, transformasi digital dalam tata kelola perikanan melalui sistem pemantauan kapal dan digitalisasi perizinan, serta program pemberdayaan nelayan kecil telah menghasilkan peningkatan produktivitas sektor perikanan hingga 8,64% di tengah perlambatan ekonomi nasional. Data statistik menunjukkan pemulihan stok ikan yang signifikan dari 6,5 juta ton pada 2013 menjadi 12,45 juta ton pada 2017, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 menjadi 114 dan Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) menjadi 127. Penguatan kedaulatan maritim nasional melalui pengawasan digital yang didukung oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan memanfaatkan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) telah meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Dimensi ekologis dari revolusi kebijakan maritim juga terlihat melalui inisiatif konservasi laut dan pengembangan wisata bahari berkelanjutan yang memperkuat hubungan antara sektor pariwisata dan pelestarian lingkungan laut. Pendekatan holistik ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara aspek ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan sektor kelautan. Integrasi antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan. Strategi ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara sinergis.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi aparatur, dan hambatan adaptasi teknologi di kalangan masyarakat pesisir, kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti telah berhasil meletakkan fondasi penting bagi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan transformasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga oleh karakteristik pemimpin yang mampu menginspirasi perubahan, membangun komunikasi efektif, dan memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian hasil konkret yang terukur. Pendekatan



kepemimpinan yang menekankan pemberdayaan nelayan kecil melalui peningkatan keterampilan, penyediaan sarana produksi modern, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar telah menciptakan model tata kelola yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional saat ini tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya untuk masa depan. Gaya kepemimpinan progresif dan inovatif yang menonjolkan kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan, meskipun berhadapan dengan struktur politik yang didominasi laki-laki, telah menjadi katalisator dalam transformasi tata kelola sektor kelautan Indonesia menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Untuk pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan Indonesia ke depan, diperlukan keberlanjutan pendekatan transformasional yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dengan tetap memprioritaskan kedaulatan maritim nasional. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi strategi mempertahankan momentum transformasi kebijakan maritim pasca masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Identifikasi model adopsi inovasi yang lebih efektif bagi masyarakat pesisir dalam menghadapi transformasi digital sektor perikanan menjadi kebutuhan mendesak. Kontinuitas dan adaptasi dari model kepemimpinan transformasional ini akan menentukan keberhasilan jangka panjang pembangunan sektor maritim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjeli, S. M., Yulendra, F. D., Apriadi, I., Pardede, V., & Al Akbar, M. H. (2024). Menyoroti Gaya Kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti di Era Modern. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 16–25.
- Ambari, M. (2015). Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat. *MONGABAY Situs Berita Lingkungan*. Dilihat 7 Mei 2025. <https://www.mongabay.co.id/2015/05/19/hasil-moratorium-kapal-eks-asing-perikanan-indonesia-mulai-menggeliat/>
- Baskoro, A., & Hofifah, H. (2023). Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- “Biografi Susi Pudjiastuti, Dulu Penjual Ikan Kini Menjadi Menteri Kelautan”. *Biografiku*. 2018.
- Elisafira, E., & Usmaedi, U. (2023). Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1),
- Endrawati, E. (2015). Penerapan Komunikasi Kesehatan Untuk Pencegahan Penyakit Leptospirosis Pada Masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 1-25.
- Jayawibawa, Marcellus Hakeng. (2023). Kedaulatan Maritim Indonesia. *KOMPASCOM*. Dilihat 7 Mei 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/11060701/kedaulatan-maritim-indonesia?page=all>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).



- Leonardo, A., & Deeb, N. (2022). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions.
- Manfaat Teknologi Pengawasan Laut dalam Meningkatkan Produktivitas Perikanan. (2025). Dilihat 7 Mei 2025. <https://bakamlakotalama.com/2025/04/manfaat-teknologi-pengawasan-laut-dalam-meningkatkan-produktivitas-perikanan/>
- Mubarok, Z. (2020). IUU Fishing and Transnational Organized Crimes.
- Pratiwi, A. D. R. (2021). Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik di Tengah Pandemi COVID-19: Kasus Penerapan Aplikasi JAKI di Provinsi DKI Jakarta. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
- Rahmanda, A. R. (2024). Tata Kelola dan Tantangan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(2)
- Santoso. (2023). Politik Hukum Kelembagaan Laut yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 12 (3)
- SUSI PUDJIASTUTI SEBAGAI MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN. June 2021. <https://www.researchgate.net/publication/352486861>
- Stevani, S., & Widayatmoko, W. (2017). Kepribadian dan Komunikasi Susi Pudjiastuti dalam membentuk personal branding. *Jurnal Komunikasi Untar*, 9(1), 65-73.
- Wahyuni, E. T., & Ismail, D. (2020). Tantangan Institusionalisasi dan Akuntabilitas BUMDes di Tasikmalaya: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 8(2).
- Wisata Bahari Berbasis Konservasi. (2022). Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta. Dilihat 7 Mei 2025. https://jackocean.artristik.co.id/wisata_bahari_deskripsi
- Yanyan M. Yani & Ian Montratama. (2017). Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Universitas Padjadjaran. Vol 4(1)
- Yuwono, Joko. (2018). EPCS Fisheries: Digitalisasi Sektor Perikanan Indonesia Menuju Era Industri 4.0. *Kumparan*. Dilihat 7 Mei 2025. <https://kumparan.com/joko-yuwono/epcs-fisheries-digitalisasi-sektor-perikanan-indonesia-menuju-era-industri-4-0-1545734640861045002>